

DINAMIKA POLITIK PASCA REKOMENDASI MUHAMMADIYAH TERHADAP CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2025-2030

POLITICAL DYNAMICS AFTER MUHAMMADIYAH'S RECOMMENDATION FOR THE CANDIDATES FOR REGENT OF TANAH DATAR REGENCY FOR THE 2025-2030 PERIOD

Lily Hemalia¹

¹Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Email: lilyhemalia@gmail.com

Zaimul Ihsan²

²STIA BNM Kota Pariaman
Email: zaimulihسان@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana dinamika politik pasca rekomendasi Muhammadiyah terhadap calon kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar periode 2025-2030, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap persyarikatan. Masalah utama dalam penelitian ini berfokus pada perubahan sikap dan pola relasi internal serta eksternal organisasi setelah surat rekomendasi tersebut ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci dari pengurus PDM, LHKP, dan PCM, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori Pertukaran Politik yang dikemukakan oleh George Casper Homans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca rekomendasi Muhammadiyah terhadap pasangan calon kepala daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2025–2030, terjadi dinamika politik internal di PDM dan PCM dengan adanya perbedaan sikap dan interpretasi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh PDM dan konflik internal di ortom Muhammadiyah. Dampak terhadap perserikatan Muhammadiyah terlihat dari penguatan posisi moral, pendidikan dan sosial melalui dukungan pemerintah terhadap sekolah Muhammadiyah, bantuan sarana-prasarana, beasiswa siswa, serta fasilitasi kegiatan keagamaan, sehingga rekomendasi mendorong terciptanya kepemimpinan daerah yang responsif dan tetap menjaga keberlanjutan nilai-nilai persyarikatan. Penelitian ini merekomendasikan agar perbedaan pandangan internal organisasi diselesaikan melalui dialog dan etika organisasi demi menjaga persatuan persyarikatan, serta pentingnya menjaga keberlanjutan nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah dalam setiap kebijakan politik.

Kata Kunci: *Dinamika Politik, Rekomendasi Muhammadiyah, Pertukaran Politik*

Abstract

This study aims to analyze the political dynamics following Muhammadiyah's recommendation regarding candidates for regional head in Tanah Datar Regency for the 2025–2030 period, and to identify its impact on the organization. The primary issue examined concerns changes in attitudes and patterns of internal and external organizational relations after the issuance of the recommendation letter. The research employs a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected through observation, in-depth interviews with key informants from PDM, LHKP, and

PCM administrators, as well as document analysis. Data analysis was conducted using the Political Exchange Theory proposed by George Caspar Homans. The findings indicate that following Muhammadiyah's recommendation of candidates for regional head in Tanah Datar Regency for the 2025–2030 period, internal political dynamics emerged within PDM and PCM, marked by differences in attitudes and interpretations of the recommendation issued by PDM, as well as internal conflicts within Muhammadiyah's autonomous organizations. The impact on Muhammadiyah is reflected in the strengthening of its moral, educational, and social position through government support for Muhammadiyah schools, infrastructure assistance, student scholarships, and facilitation of religious activities. The recommendation consequently contributed to the emergence of responsive regional leadership while maintaining the continuity of Muhammadiyah's organizational values. This study recommends that internal differences of opinion be resolved through dialogue and adherence to organizational ethics in order to preserve unity, and emphasizes the importance of sustaining Muhammadiyah's core values in every political policy.

Keywords: Political Dynamics, Muhammadiyah Recommendations, Political Exchange

PENDAHULUAN

Dinamika merupakan gerak perubahan berkelanjutan dalam masyarakat yang lahir dari berbagai interaksi sosial, baik pada ranah budaya maupun politik. Konteks politik mencerminkan proses interaksi antarberbagai kekuatan, seperti partai politik, tokoh masyarakat, dan kebijakan pemerintah yang bergeser seiring perkembangan zaman. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan hukum yang berlaku di tengah masyarakat (Surbakti, 2010).

Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2025–2030 memicu ketegangan internal antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Tanah Datar dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) X Koto Batipuah terkait arah dukungan. PDM mengedepankan stabilitas organisasi dan marwah khittah perserikatan. Sebaliknya, PCM X Koto Batipuah secara nyata memberikan dukungan kepada figur yang dinilai memiliki kedekatan historis dan emosional dengan kader di tingkat akar rumput. Perbedaan orientasi ini menimbulkan konflik internal, di mana langkah cabang dianggap terlalu jauh memasuki ranah politik praktis, sementara pihak daerah dinilai kurang responsif terhadap aspirasi lokal.

Konflik yang muncul bersifat struktural dan ideologis, bukan sekadar persoalan personal. PDM menekankan pentingnya netralitas agar organisasi tidak terfragmentasi oleh perbedaan preferensi politik. Argumentasi PCM X Koto Batipuah justru menitikberatkan bahwa dukungan terhadap calon tertentu adalah

bagian dari tanggung jawab moral kader dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Intensitas interaksi sosial antara kandidat dengan tokoh Muhammadiyah setempat memperkuat posisi cabang dan menciptakan resistensi terhadap sikap moderat pimpinan daerah. Lingkup kerja PDM menuntut pertimbangan yang lebih luas, sedangkan PCM bergerak dalam ruang sosial yang lebih intim dengan dinamika masyarakat setempat. Kondisi tersebut menghasilkan perbedaan prioritas antara menjaga konsolidasi organisasi dengan merespons kedekatan sosial kandidat. Fakta ini menegaskan bahwa keputusan organisasi kemasyarakatan dalam politik tidak bersifat monolitik, melainkan dipengaruhi oleh struktur internal, basis sosial, dan relasi emosional.

Penelitian ini berfokus pada dinamika politik pasca munculnya rekomendasi terhadap pasangan calon serta dampak pemberian dukungan tersebut bagi Perserikatan Muhammadiyah di Kabupaten Tanah Datar. Teori Pertukaran Politik dari George Caspar Homans digunakan sebagai pisau analisis melalui prinsip timbal balik (*reciprocity*), perhitungan manfaat-biaya (*reward-cost*), ketergantungan kekuatan (*dependence and power*), serta kepuasan berkelanjutan. Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan menjaga soliditas organisasi di tengah kontestasi politik agar perbedaan pilihan tetap berada dalam koridor ukhuwah dan adab berorganisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang diterapkan memiliki sifat deskriptif kualitatif, di mana menurut Sukmadianata, Deskriptif Kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, kejadian, aktivitas, sikap sosial, keyakinan, persepsi, serta individu atau kelompok (Sukmadianata, 2011). Robert Bogdan dan Steven J. Taylor yang dikutip oleh Saprijon menyatakan bahwa pendekatan dan metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa narasi atau tulisan dan perilaku yang bisa diamati (Bogdan & Taylor, 1992). Dengan kata lain, tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami pengalaman fenomena yang dirasakan oleh subjek penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Metode ini merupakan serangkaian prosedur penelitian yang menciptakan data deskriptif dalam bentuk kata-kata lisan atau tulisan, serta perilaku yang dapat diamati, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menganalisis narasi, konten, dan sentimen publik secara mendalam, serta memahami persepsi pemilih melalui wawancara dan survei. (Moleong, 2017)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam Dinamika Pasca Rekomendasi Muhammadiyah terhadap calon kepala daerah kabupaen tanah datar periode 2025-2030, berdasarkan Prinsip teori pertukaran politik, sesuai dengan teori George Caspar Homans. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Tanah Datar beserta unsur organisasi otonom dan struktur terkait yang terlibat dalam dinamika pasca pemberian rekomendasi, Pemilihan Kabupaten Tanah Datar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan arena langsung terjadinya dinamika politik yang menjadi fokus kajian, khususnya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah periode 2025–2030. Penentuan informan ini meliputi aktor kunci (*key informants*) yang memiliki peran strategis dalam struktur organisasi serta pemahaman mendalam mengenai proses pemberian rekomendasi politik. Aktor-aktor kunci tersebut adalah Deri Rizal, S.H.I., M.H. (Sekretaris PDM Tanah Datar), Dra. Hj. Rusda Rusli, M.Pd. (Sekretaris PDA Tanah Datar), Nopil Asrianto, S.H.I., M.H. (Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Tanah Datar), dan Novi Budiman, S.IP., M.Si. (Ketua LHKP Tanah Datar). Keterlibatan mereka sangat krusial karena mereka berada di lingkaran pengambil kebijakan yang memahami dinamika internal persyarikatan secara utuh.

Selain aktor kunci, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung untuk memperkaya perspektif dari tingkat akar rumput dan organisasi otonom. Informan pendukung ini terdiri dari Wahyu Salim, S.Ag. (Ketua PCM Batipuah X Koto) dan Rifa Bermawi, S.Pd. (Ketua PCA Batusangkar).

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang dihimpun melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan

semi-terstruktur kepada informan kunci yang meliputi pengurus PDM Kabupaten Tanah Datar, pengurus PCM X Koto Batipuah, serta tokoh-tokoh perserikatan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Observasi dilakukan dengan memantau langsung dinamika interaksi sosial dan aktivitas politik di lingkungan internal Muhammadiyah pasca pemberian rekomendasi pasangan calon. Dokumentasi mencakup pengumpulan regulasi internal organisasi, surat rekomendasi resmi, catatan rapat pleno, serta publikasi media massa untuk memperkuat validitas temuan terkait pergeseran dukungan politik.

Teknik analisis data mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap reduksi difokuskan pada pemilahan informasi hasil wawancara dan observasi yang relevan dengan indikator pertukaran politik serta friksi struktural organisasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sistematis guna menggambarkan alur dinamika pasca rekomendasi secara kronologis. Tahap akhir penelitian adalah penarikan kesimpulan yang divalidasi melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menjamin keabsahan data (Miles, Huberman, & Saldoña, 2014). Proses ini memastikan hasil analisis bersifat objektif dalam menjawab permasalahan mengenai dampak rekomendasi politik terhadap soliditas Perserikatan Muhammadiyah di Kabupaten Tanah Datar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Politik Internal Pasca Rekomendasi

Hasil penelitian di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa pasca keluarnya rekomendasi terhadap pasangan calon kepala daerah periode 2025–2030, terjadi dinamika politik internal yang signifikan. Dinamika tersebut ditandai oleh munculnya perbedaan sikap dan interpretasi antara PDM dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM). PDM Kabupaten Tanah Datar memandang rekomendasi sebagai instrumen moral dan etik yang berlandaskan pada khittah serta AD/ART organisasi untuk menjaga jarak dari politik praktis. Sebaliknya, temuan di lapangan memperlihatkan bahwa PCM X Koto Batipuah memiliki kecenderungan dukungan yang lebih

eksplisit karena pengaruh kalkulasi pertukaran politik dan kedekatan sosial dengan kandidat tertentu.

Proses pemberian rekomendasi ini bukan merupakan keputusan personal, melainkan hasil mekanisme organisasi melalui pengkajian oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP). Meskipun prosesnya formal, perbedaan penilaian tetap muncul di tingkat akar rumput yang memahami rekomendasi secara lebih pragmatis sebagai bentuk dukungan politik nyata.

Tabel 1. Alur rekomendasi Muhammadiyah

No.	Tahapan	Aktor/Lembaga	Uraian Proses	Tanggal/Waktu Pelaksanaan
1.	Penjaringan Awal	LHKP dan PDM Tanah Datar	Pengumpulan nama bakal calon kepala daerah melalui masukan PCM, PRM, dan tokoh Muhammadiyah	05 Januari– 18 Februari 2024
2.	Verifikasi Administratif	LHKP dan PDM Tanah Datar	Pemeriksaan latar belakang calon, rekam jejak, integritas, dan kesesuaian dengan nilai-nilai Muhammadiyah	20 Februari 2024
3.	Pendalaman dan Wawancara	LHKP dan PDM Tanah Datar	Wawancara calon terkait visi, komitmen keumatan, kebijakan publik, dan relasi dengan masyarakat	Maret 2024
4.	Rekomendasi PDM	PDM Kabupaten Tanah Datar	Pembahasan hasil penjaringan dan wawancara dalam rapat pleno PDM untuk merumuskan calon yang akan direkomendasikan	Akhir Maret 2024
5.	Penyampaian ke Wilayah	PDM → PWM Sumatera Barat	Hasil Rekomendasi PDM disampaikan kepada PWM	Awal April 2024
6.	Pleno PWM	PWM Sumatera Barat	Pembahasan dan pengesahan rekomendasi kepala daerah kabupaten secara kolektif kolegal	April 2024

7.	Penetapan Rekomendasi	PWM Sumatera Barat	Eka Putra ditetapkan sebagai calon Bupati Tanah Datar yang direkomendasikan Muhammadiyah	Akhir April 2024
8.	Pengumuman Resmi	PWM Sumatera Barat	Rekomendasi diumumkan secara terbuka dalam forum resmi PWM Sumatera Barat	Mei 2024
9.	Sosialisasi Internal	PDM & PCM	Penyampaian hasil rekomendasi kepada struktur dan warga Muhammadiyah di tingkat daerah dan cabang	Mei–Juni 2024
10.	Implementasi Moral	Warga Muhammadiyah	Rekomendasi dijadikan rujukan etis dan moral, bukan instruksi politik yang bersifat mengikat	Pasca pengumuman hingga Pilkada 2024

Analisis Teori Pertukaran Politik George Caspar Homans

Pembahasan mengenai dinamika ini dianalisis menggunakan empat prinsip utama Teori Pertukaran Politik George Caspar Homans untuk membedah interaksi antaraktor dalam perserikatan (Homans, 1961):

1. Prinsip Timbal Balik (*Reciprocity*):

Hubungan antara warga Muhammadiyah dengan calon kepala daerah menekankan pada aspirasi kemajuan sektor pendidikan, sosial, dan dakwah. Dukungan moral dan legitimasi sosial yang diberikan organisasi dipertukarkan dengan komitmen calon untuk memperhatikan kepentingan umat jika terpilih nanti.

2. Prinsip Perhitungan Manfaat dan Biaya (*Reward-Cost Calculation*):

Aktor-aktor di tingkat cabang melakukan kalkulasi terhadap ekspektasi manfaat jangka pendek maupun panjang bagi amal usaha mereka. Biaya politik yang dikeluarkan berupa penggunaan tenaga, waktu, dan energi organisasi dipertimbangkan terhadap potensi keberlanjutan program yang ditawarkan kandidat.

3. Prinsip Ketergantungan dan Kekuatan (*Dependence and Power*): Muhammadiyah tidak memiliki kekuasaan struktural di pemerintahan, namun memiliki kekuatan sosial yang besar melalui kepercayaan masyarakat. Calon kepala daerah memiliki ketergantungan terhadap legitimasi moral Muhammadiyah untuk memperkuat citra publik mereka, sementara Muhammadiyah bergantung pada kebijakan kepala daerah untuk alokasi anggaran pendidikan dan sosial.
4. Prinsip Kepuasan dan Keberlanjutan (*Satisfaction and Continuity*): Keberhasilan calon dalam mewujudkan janji kampanye dan program unggulan yang berpihak pada masyarakat akan menentukan tingkat kepuasan perserikatan. Jika kepuasan ini tercapai, maka relasi antara Muhammadiyah dan pemerintah daerah akan terus berlanjut secara harmonis dalam jangka panjang.

Dinamika politik pasca rekomendasi Muhammadiyah terhadap calon kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2025-2030.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik pasca rekomendasi Muhammadiyah terhadap calon kepala daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2025–2030 ditandai konflik internal antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) X Koto yang tergabung dalam Pabasko Padang Panjang X Koto (PABASKO). PDM menetapkan dukungan kepada Eka Putra melalui keputusan struktural yang diposisikan sebagai hasil pertimbangan kelembagaan dan mengikat secara organisasi. Sebaliknya, PCM X Koto memberikan dukungan kepada Richi berdasarkan pertimbangan kontekstual, kedekatan sosial, serta persepsi manfaat langsung bagi warga.

Proses penetapan rekomendasi melibatkan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat dan ditetapkan secara resmi oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, sehingga memiliki legitimasi formal. Perbedaan sikap tersebut mencerminkan benturan antara kepatuhan struktural dan rasionalitas pragmatis di tingkat cabang. PDM memprioritaskan konsistensi organisasi dan legitimasi kelembagaan, sedangkan PCM menekankan otonomi lokal dalam membaca realitas politik.

Temuan penelitian memperlihatkan fragmentasi sikap politik internal sebagai bentuk negosiasi antara disiplin organisasi dan kebebasan aktor lokal. Dinamika ini tidak semata berkaitan dengan dukungan calon, tetapi mencerminkan relasi kuasa, legitimasi, dan otonomi dalam tubuh organisasi. Pengelolaan perbedaan memerlukan dialog dan etika organisasi untuk mencegah konflik yang berpotensi melemahkan persyarikatan.

Perspektif normatif Islam menegaskan pentingnya penyikapan perbedaan secara bijaksana sebagaimana termuat dalam QS. An-Nahl [16]: 125, menekankan dakwah dengan hikmah dan perdebatan secara santun (Shihab, 2002).

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

Posisi PDM Kabupaten Tanah Datar berada dalam dilema antara menjaga independensi sebagai gerakan dakwah dan merespons realitas politik lokal. Rekomendasi dipahami sebagai instrumen moral dan etik, namun dalam praktiknya memunculkan tafsir beragam di kalangan warga dan elite politik. Kompleksitas ini menempatkan PDM sebagai aktor sosial-politik yang strategis sekaligus rentan terhadap tarik-menarik kepentingan dalam kontestasi politik daerah

Dampak terhadap Perserikatan Muhammadiyah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi Muhammadiyah kepada Eka Putra sebagai calon kepala daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2025–2030 menimbulkan dampak yang bersifat multidimensional bagi persyarikatan, mencakup aspek organisasi, politik lokal, dan relasi kelembagaan dengan pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut tidak hanya diposisikan sebagai sikap moral organisasi dalam kontestasi politik, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam memperkuat daya pengaruh Muhammadiyah dalam proses perumusan kebijakan publik pasca pemilihan kepala daerah.

Rekomendasi kepada Eka Putra memperluas akses komunikasi antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanah Datar dan pemerintah daerah.

Hubungan kelembagaan menjadi lebih terbuka dalam pembahasan isu pendidikan, kegiatan sosial keagamaan, serta pengembangan amal usaha. Kondisi ini memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi Muhammadiyah dalam menyampaikan aspirasi umat melalui jalur formal pemerintahan.

Analisis berdasarkan teori pertukaran politik menunjukkan bahwa relasi pasca rekomendasi berlangsung dalam bentuk pertukaran simbolik dan institusional. Muhammadiyah memberikan dukungan moral serta legitimasi sosial, sedangkan kepala daerah diharapkan membuka ruang dialog kebijakan dan mengakomodasi kepentingan publik yang sejalan dengan nilai persyarikatan. Penelitian tidak menemukan adanya kesepakatan tertulis atau janji jabatan, namun terdapat harapan timbal balik yang dipahami secara normatif oleh kedua pihak.

Dampak internal juga muncul dalam bentuk perbedaan preferensi politik pada tingkat cabang, seperti yang terjadi di PCM X Koto Pabasko. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya jarak antara keputusan struktural dan pilihan politik sebagian kader. Situasi ini memengaruhi pola konsolidasi organisasi serta memperlihatkan dinamika komunikasi internal yang lebih intens setelah rekomendasi ditetapkan.

Risiko reputasional menjadi konsekuensi lain dari keputusan tersebut. Keberhasilan maupun kegagalan kebijakan kepala daerah berpotensi dikaitkan dengan sikap politik Muhammadiyah. Organisasi tidak hanya memperoleh penguatan legitimasi simbolik, tetapi juga menghadapi kemungkinan penilaian publik apabila kebijakan pemerintah dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dinamika pasca rekomendasi juga memperlihatkan adanya peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap peran Muhammadiyah dalam mengawal kebijakan daerah. Keterlibatan organisasi dalam proses politik memunculkan tuntutan agar persyarikatan tetap konsisten terhadap nilai keadilan sosial dan kepentingan umat. Tuntutan tersebut memperkuat posisi Muhammadiyah sebagai aktor moral sekaligus memperbesar tanggung jawab sosialnya.

Hubungan yang terbangun pasca rekomendasi memperlihatkan penguatan peran advokasi kebijakan pada tingkat daerah. Muhammadiyah memiliki peluang lebih besar untuk menyampaikan gagasan strategis mengenai pendidikan,

pelayanan sosial, dan pembinaan keagamaan. Kesempatan tersebut menjadi bagian dari konsekuensi politik yang melekat pada keputusan rekomendasi.

Kondisi internal organisasi mengalami penyesuaian dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antar tingkatan kepemimpinan. Forum musyawarah dan dialog menjadi lebih aktif untuk merespons perbedaan pandangan. Proses tersebut menunjukkan adanya pembelajaran organisasi dalam mengelola dinamika politik tanpa menghilangkan prinsip independensi.

Keseluruhan temuan memperlihatkan bahwa dinamika politik pasca rekomendasi tidak hanya berdampak pada relasi eksternal, tetapi juga pada struktur dan budaya organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Tanah Datar. Keputusan tersebut memperkuat posisi tawar dalam kebijakan publik, namun sekaligus memunculkan tantangan konsolidasi internal. Realitas ini menegaskan bahwa rekomendasi politik merupakan langkah strategis yang membawa implikasi luas bagi persyarikatan.

SIMPULAN

Pemberian rekomendasi Muhammadiyah terhadap calon kepala daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2025–2030 merupakan manifestasi politik nilai yang mengintegrasikan pertimbangan ideologis, etis, dan organisatoris. Mekanisme ini dilakukan secara terstruktur melalui musyawarah berjenjang mulai dari tingkat ranting hingga daerah dengan melibatkan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP). Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan organisasi lebih menitikberatkan pada kriteria kepemimpinan amanah dan kemaslahatan umat dibandingkan pertimbangan elektoral pragmatis. Meskipun terdapat dinamika perbedaan interpretasi di internal persyarikatan. Hubungan timbal balik yang dibangun dengan calon kepala daerah berfokus pada keberlanjutan program pendidikan, sosial, dan dakwah sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat.

Penelitian ini memberikan manfaat teoretis dalam memperkaya kajian sosiologi politik organisasi keagamaan, serta manfaat praktis sebagai panduan bagi persyarikatan dalam menghadapi momentum politik di masa depan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas fokus penelitian pada wilayah yang

memiliki karakteristik sosiopolitik berbeda guna mendapatkan perbandingan yang lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan metode kualitatif fenomenologi dapat dipertimbangkan untuk menggali lebih dalam pengalaman subjektif para aktor di tingkat akar rumput pasca-rekomendasi dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1992). *Introduction to qualitative research methods: A phenomenological approach in the social sciences*. Allyn & Bacon.
- Homans, G. C. (1961). *Social behavior: Its elementary forms*. Harcourt, Brace & World.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 7). Lentera Hati.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Al-Qur'an. (n.d.). QS. An-Nahl [16]: 125.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nashir, H. (2010). *Muhammadiyah gerakan pembaruan*. Suara Muhammadiyah.
- Saprijon. (2013). *Metodologi penelitian sosial*. Pustaka Pelajar.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik* (Edisi kedua). PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syarifuddin, A. (2019). Muhammadiyah dan politik: Tinjauan atas khittah dan praktik organisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(3), 145–160.
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 1–16.